



Astra Brata sebagai Role Model dalam Menjawab Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Syarif Abdul Rochim

Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

abdulrochimsyarif@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ajaran Astra Brata secara komprehensif dan menganalisis relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut sebagai model kepemimpinan dalam konteks krisis kepemimpinan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menelaah teks-teks klasik seperti Serat Rama, Serat Nitiruti, dan Serat Sruti Jarwa, serta interpretasi modern tentang etika dan kepemimpinan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi prinsip-prinsip utama Astra Brata, seperti keadilan, kebijaksanaan, integritas, dan kesederhanaan, yang dipandang relevan untuk mengatasi tantangan kontemporer seperti rendahnya kepercayaan publik, korupsi, dan lemahnya akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Astra Brata tidak hanya menekankan dimensi fisik dalam kepemimpinan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, integritas, dan kesederhanaan. Sebagai ilustrasi, Surya Brata menekankan pentingnya musyawarah dan keadilan dalam penyelesaian konflik sosial, sedangkan Bayu Brata menyoroti perlunya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam memahami aspirasi masyarakat. Di sisi lain, Kuwera Brata menekankan integritas dan kesederhanaan dalam merespons kesenjangan sosial yang semakin nyata di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Astra Brata menawarkan kerangka normatif yang relevan dan fleksibel dalam mengatasi krisis kepemimpinan di Indonesia, terutama dalam konteks tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di era modern. Dengan menekankan aspek etika dan moral, ajaran ini menyediakan solusi berkelanjutan dalam menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kata Kunci: Serat Rama, Serat Nitiruti, Kakawin Ramayana, Serat Pethikan Pustakaraja Purwa, Serat Rama, dan Serat Sruti Jarwa

Abstract: This study aims to comprehensively explore the teachings of Astra Brata and analyze the relevance of its values as a leadership model within the context of Indonesia's leadership crisis. Employing a qualitative approach through library research, this study examines classical texts such as Serat Rama, Serat Nitiruti, and Serat Sruti Jarwa, alongside modern interpretations of ethics and leadership. This approach enables the identification of the core principles of Astra Brata, including justice, wisdom, integrity, and simplicity,

which are deemed relevant in addressing contemporary challenges such as low public trust, corruption, and weak accountability. The findings reveal that the teachings of Astra Brata emphasize not only the physical aspects of leadership but also values such as justice, wisdom, integrity, and simplicity. For instance, Surya Brata underscores the importance of deliberation and justice in resolving social conflicts, while Bayu Brata highlights the need for vigilance and wisdom in understanding public aspirations. Meanwhile, Kuwera Brata emphasizes integrity and simplicity in addressing the growing social disparities in Indonesia. This study concludes that the teachings of Astra Brata offer a relevant and flexible normative framework for addressing Indonesia's leadership crisis, particularly within the complex social, political, and economic challenges of the modern era. By emphasizing ethical and moral aspects, these teachings provide sustainable solutions for creating leadership that is more inclusive, just, and oriented toward collective welfare.

Key Words: Serat Rama, Serat Nitistruti, Kakawin Ramayana, Serat Pethikan Pustakaraja Purwa, Serat Rama, Serat Sruti Jarwa.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Sebagai entitas yang memandu arah kebijakan dan implementasi strategis, kepemimpinan yang efektif mampu menciptakan stabilitas dan mendorong kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia, peran kepemimpinan menjadi lebih penting mengingat kompleksitas negara ini yang terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama, serta berbagai tantangan struktural yang harus dihadapi (Brigg et al., 2016, p. 407). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami tantangan serius terkait dengan krisis kepemimpinan, yang semakin mengemuka dan berdampak luas pada berbagai sektor.

Krisis kepemimpinan di Indonesia dapat diidentifikasi dari sejumlah indikator yang signifikan, salah satunya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap para pemimpin, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada tanggal 13-18 Desember 2023, menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperoleh tingkat kepercayaan publik tertinggi, yaitu sebesar 91,2%. Hal ini menegaskan posisi TNI sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia, dengan hanya 8,0% responden yang menyatakan tidak percaya, dan 0,8% yang tidak memberikan jawaban (Putri, 2024).

Di posisi kedua, Presiden Republik Indonesia mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 86,1%, dengan 13,2% responden menyatakan tidak percaya, dan 0,7% tidak memberikan jawaban. Tingginya tingkat kepercayaan terhadap Presiden menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja eksekutif dalam mengelola negara, meskipun masih ada sejumlah kecil responden yang skeptis. Lembaga-lembaga penegak hukum dan

peradilan, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA), memiliki tingkat kepercayaan yang hampir sama, masing-masing sebesar 73,8% dan 73,5% (Putri, 2024). Ini menandakan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap kedua lembaga tersebut, meskipun sekitar 24% responden menyatakan tidak percaya terhadap kinerja mereka.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Kepolisian menunjukkan angka kepercayaan yang sedikit lebih rendah. MK dipercaya oleh 67,3% responden, sementara 65,5% responden menyatakan kepercayaan terhadap Kepolisian. Namun, tingkat ketidakpercayaan terhadap kedua lembaga ini cukup tinggi, yaitu 30,2% untuk MK dan 33,8% untuk Kepolisian. Hal ini mungkin mencerminkan beberapa ketidakpuasan publik terkait penanganan isu-isu hukum yang melibatkan lembaga-lembaga ini. Lebih jauh, lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami tantangan yang lebih besar dalam meraih kepercayaan publik. DPD hanya mendapatkan kepercayaan dari 60,4% responden, sedangkan DPR mendapatkan angka yang lebih rendah, yaitu 56,2% (Kamil, 2024). Tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap DPR (42,8%) menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang signifikan terhadap lembaga legislatif ini, mungkin terkait dengan isu-isu korupsi dan kinerja yang dinilai tidak memadai oleh masyarakat.

Yang paling mengkhawatirkan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang hanya dipercaya oleh 58,8% responden, sementara 40,1% responden menyatakan tidak percaya. (Kamil, 2024) Sebagai lembaga yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, rendahnya tingkat kepercayaan ini menunjukkan adanya erosi kepercayaan publik, kemungkinan akibat dari berbagai kontroversi dan pelemahan institusi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, krisis kepemimpinan di Indonesia tidak hanya dilihat dari aspek kepercayaan publik, tetapi juga dari peningkatan praktik korupsi yang melibatkan pemimpin-pemimpin utama di berbagai tingkatan.

Kasus-kasus korupsi yang merajalela, seperti yang dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mencerminkan kegagalan pemimpin dalam menampilkan integritas dan transparansi (Media, 2024). Banyak pemimpin lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok mereka, mengabaikan tanggung jawab utama mereka untuk melayani rakyat. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2023, mencatat sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang tersangka, dan potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Kejaksaan menangani 551 kasus dengan 1.163 tersangka, Kepolisian

menangani 192 kasus dengan 385 tersangka, dan KPK menangani 48 kasus dengan 147 tersangka (Anandya et al., 2023, p. 9).

Fenomena ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam alokasi sumber daya, di mana kebijakan seringkali tidak berpihak pada masyarakat luas, tetapi lebih menguntungkan elite politik tertentu. Rendahnya integritas dan transparansi dalam kepemimpinan di Indonesia juga mengakibatkan ketidakmampuan para pemimpin dalam merespons dengan efektif tuntutan masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi dan semakin meningkatnya kesadaran politik masyarakat, ekspektasi publik terhadap kualitas kepemimpinan semakin tinggi. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya jurang yang lebar antara harapan publik terhadap figur pemimpin ideal dan praktik kepemimpinan yang dijalankan.

Pemimpin yang diharapkan memiliki visi, kompetensi, dan kemampuan membuat keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama justru seringkali terperangkap dalam konflik kepentingan, sehingga keputusan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Fenomena ini menunjukkan urgensi akan adanya model kepemimpinan baru yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap para pemimpin bangsa. Dalam konteks inilah, *Hastrabrata* sebuah konsep kepemimpinan kuno yang sarat dengan nilai-nilai moral dan etika masa lalu kembali diangkat sebagai role model yang relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan di Indonesia (Selvarajah et al., 2017, p. 373).

Secara historis *Astra Brata* diambil dari ajaran dalam epos *Ramayana* dan *Mahabharata* yang kemudian mengalami perubahan interpretasi pada saat ajaran Islam mulai berkembang di tanah Jawa, di mana seorang pemimpin ideal diharapkan meniru delapan sifat dewa yang merepresentasikan elemen alam, seperti matahari, bulan, bintang, angin, dan lainnya (Andoko et al., 2022, p. 2731). Setiap elemen alam ini melambangkan sifat-sifat yang diperlukan untuk membentuk seorang pemimpin yang berintegritas, bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu membawa harmoni dalam Masyarakat (Suyono, 2023, p. 83). Dengan mengadopsi dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam *Astra Brata*, para pemimpin di Indonesia diharapkan mampu mengatasi krisis kepercayaan publik yang saat ini tengah dihadapi.

Nilai-nilai kepemimpinan yang mementingkan kesejahteraan bersama, transparansi, dan etika moral diyakini dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ajaran *Hastrabrata* secara mendalam dan menganalisis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut dapat dijadikan sebagai model kepemimpinan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada relevansi ajaran *Astra Brata* dalam konteks

kepemimpinan modern, terutama dalam menghadapi krisis kepemimpinan yang tengah berlangsung. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengeksplorasi secara mendalam ajaran Astra Brata dan menganalisis relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran tersebut sebagai model kepemimpinan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami konsep-konsep filosofis dan etis yang terdapat dalam teks ajaran Astra Brata, serta menganalisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kepemimpinan kontemporer, terutama dalam menghadapi krisis kepemimpinan yang tengah berlangsung. Seperti yang dijelaskan oleh Creswell, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna mendalam dari suatu fenomena, terutama dalam konteks sosial, budaya, dan politik (Creswell, 2014, p. 232).

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap literatur yang relevan, termasuk buku-buku klasik yang menjelaskan ajaran Astra Brata, karya-karya filosofis tentang etika kepemimpinan, serta artikel-artikel ilmiah yang mengkaji krisis kepemimpinan di Indonesia. Studi pustaka ini melibatkan kajian terhadap sumber-sumber primer, seperti Serat Rama, Serat Nitiruti, Serat Astrabrata, naskah Pakualaman, dan Serat Sruti Jarwa yang menjadi dasar ajaran Hastrabrata, serta sumber-sumber sekunder berupa interpretasi modern dari ajaran tersebut. Penelusuran literatur juga mencakup jurnal-jurnal ilmiah yang mendalami kepemimpinan etis dan moral dalam konteks global dan Indonesia.

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis konten, yang bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam ajaran Hastrabrata, seperti integritas, tanggung jawab, kebijaksanaan, dan keseimbangan alam. Seperti yang diuraikan oleh Krippendorff, analisis konten memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, dan interpretasi dari data tekstual (Krippendorff, 2004, p. 18). Dalam penelitian ini, teknik ini diterapkan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Hastrabrata dapat diterapkan dalam kepemimpinan modern. Penelitian ini juga akan meneliti relevansi ajaran Hastrabrata dalam merespons krisis kepemimpinan di Indonesia yang ditandai dengan rendahnya kepercayaan publik, maraknya korupsi, dan lemahnya akuntabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Historisitas Ajaran Astra Brata

Asta Brata adalah ajaran kepemimpinan kuno yang berakar pada tradisi Hindu-Buddha di Jawa dan berasal dari bahasa Sanskerta. Secara etimologis, Asta atau Hasta berarti "*delapan*", sedangkan Brata berarti "*lelaki*" atau "*pedoman hidup*". Dengan demikian, Asta Brata merujuk pada delapan pedoman yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin atau raja. Konsep ini pertama kali muncul dalam Kitab Manawa Dharma Sastra, sebuah kitab hukum Hindu kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Kitab ini dihimpun oleh Bhagawan Bhirgu dan mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bertindak berdasarkan delapan sifat luhur yang disarankan oleh Manu, seorang pemuka agama Hindu (Anggoro, 2021, p. 229).

Dalam Manawa Dharma Sastra, ajaran Asta Brata digunakan sebagai panduan untuk membentuk seorang raja yang ideal, di mana setiap sifat mewakili elemen alam yang dihubungkan dengan perilaku dan tindakan yang harus dicontoh oleh seorang pemimpin. Sifat-sifat ini, seperti matahari, bulan, bintang, angin, air, api, bumi, dan langit, masing-masing melambangkan prinsip-prinsip penting dalam memimpin, seperti keadilan, kebijaksanaan, ketegasan, dan kedermawanan. Namun, dalam perkembangan sejarah, ajaran Asta Brata kemudian mengalami adaptasi dalam berbagai teks dan tradisi budaya di Jawa.

Pertama, salah satu gubahan terkenal dari ajaran ini terdapat dalam Serat Rama, sebuah karya sastra Jawa yang merupakan adaptasi dari Kakawin Ramayana. Serat Rama ditulis oleh Yasadipura I, seorang sastrawan Jawa yang mengabdikan diri di Kasunanan Surakarta pada abad ke-18 (Sadewa, 2023, p. 77). Menurut Pigeaud dalam (Behrend, 1990, p. 318) terdapat dua versi Serat Rama yang dikarang oleh R. Ng. Yasadipura, salah satu sastrawan Jawa terkenal. Versi pertama adalah Serat Rama yang berbentuk tembang macapat dan terdiri dari 85 pupuh, yang diyakini merupakan karya R. Ng. Yasadipura I. Versi kedua juga berbentuk tembang macapat, tetapi terdiri dari 91 pupuh dan ditulis pada tahun 1822.

Perbedaan jumlah pupuh antara kedua versi ini mencerminkan kemungkinan adanya variasi atau adaptasi dalam penulisan ulang teks, baik untuk memperluas isi cerita maupun untuk menyesuaikan dengan konteks historis dan budaya saat itu. Dalam Serat Rama, dikisahkan bahwa Rama memberikan nasihat kepada Wibisana, adiknya, yang akan naik tahta menjadi raja di Ngalengka. Ajaran Asta Brata di sini dijadikan pedoman bagi Wibisana dalam menjalankan kepemimpinannya, dengan penekanan pada sifat-sifat alamiah yang harus dimiliki seorang raja untuk menjadi pemimpin yang ideal dan adil.

Kedua, ada Serat Sruti Jarwa salah satu karya sastra penting dari masa Jawa kuno yang menjelaskan konsep kekuasaan raja Jawa, khususnya dalam konteks Keraton Surakarta Hadiningrat. Manuskrip ini disusun oleh Pangeran K.P.A. Santakusuma, putra dari Pakubuwana V, atas perintah langsung dari Raja Pakubuwana IX pada periode 1863-1868 Masehi (Marsiwi et al., 2021, p. 90). Penyalinan manuskrip ini sebanyak empat kali selama periode tersebut menunjukkan betapa pentingnya Serat Sruti Jarwa dalam lingkungan keraton dan betapa luasnya penggunaannya di dalam struktur kekuasaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada dasarnya adalah interpretasi yang lebih mendalam dan memberikan klarifikasi terhadap nilai-nilai dan ajaran kepemimpinan yang dijelaskan dalam Serat Nitistruti, dengan tambahan penjelasan dari K.P.A. Santakusuma (Marsiwi, 2020, p. 12).

Ketiga, Serat Pethikan Pustakaraja Purwa merupakan salah satu karya sastra lama yang dihasilkan oleh pujangga terkenal Raden Ngabehi Ranggawarsita, yang dikenal sebagai salah satu sastrawan dan filosof terkemuka di Keraton Surakarta pada abad ke-19. Naskah ini ditulis pada tahun 1900 dalam bentuk tembang, yaitu puisi tradisional Jawa yang disusun dalam bentuk bait-bait dengan pola rima dan irama tertentu. Ditulis menggunakan aksara dan bahasa Jawa, Serat Pethikan Pustakaraja Purwa memperlihatkan kekayaan sastra dan tradisi lisan masyarakat Jawa yang diwariskan melalui karya tulis tangan (carik). *Keempat*, dalam Kakawin Ramayana yang ditulis pada abad ke-9 Masehi, ajaran Asthabrata dinarasikan secara mendalam dalam bagian *Caturwinsati Sarggah* (Utama, 2023, p. 9).

Ajaran ini muncul setelah peristiwa kematian Rahwana, di mana Rama memberikan nasihat kepada Wibisana yang akan naik tahta untuk memimpin dan menstabilkan kondisi kerajaan Alengka yang dilanda krisis pasca perang. Nasihat yang diberikan oleh Rama disampaikan melalui simbolisasi delapan dewa yang melambangkan berbagai aspek sifat alamiah dan etis yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin (Abidin & Laskar, 2020, p. 196). Delapan dewa dalam Asthabrata melambangkan elemen-elemen alam, seperti matahari, bulan, bintang, angin, dan air, yang harus menjadi contoh bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Melalui simbolisasi ini, Rama menekankan bahwa seorang pemimpin harus bijaksana, adil, pemaaf, serta mampu menciptakan ketenangan dan stabilitas dalam masyarakat yang dipimpinnya (Rhohana, 2022, p. 267).

Kelima, Serat Ajipamasa adalah karya sastra Jawa yang ditulis oleh pujangga besar Raden Ngabehi Ranggawarsita pada tahun 1862 Masehi yang terdiri dari 55 pupuh. Secara etimologis, kata Ajipamasa berarti "*raja di antara para raja*," yang merujuk pada gelar tokoh utama dalam karya tersebut, yaitu Prabu Kusumawicitra, yang juga dikenal sebagai Maharaja Bathara Ajipamasa. Sosok Prabu Kusumawicitra menjadi sentral dalam

narasi Serat Ajipamasa sebagai model pemimpin ideal yang memiliki sifat-sifat agung dan mulia. *Keenam*, Serat Nitistruti adalah bagian dari kumpulan Serat Niti, sebuah karya sastra klasik Jawa yang berfokus pada ajaran kebijaksanaan dan etika moral dalam seni pemerintahan.

Naskah ini ditulis pada tahun 1513 Saka, yang setara dengan 1591 Masehi, dalam bentuk tembang Mocapat, yaitu puisi tradisional Jawa yang memiliki struktur dan irama khas (Karanggayam, 1994, p. 3). Sebelum datangnya agama Islam ke Nusantara, naskah-naskah Niti telah ada dan sering disebut dalam berbagai salokantara atau syair-syair kuno (Pigeaud, 1986, p. 76). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Nitistruti memiliki akar yang kuat dalam tradisi Hindu-Buddha di Jawa (Riyadi & Muzakki, 2020, p. 94). Kehadiran naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman kepemimpinan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Jawa sebelum pengaruh besar agama Islam.

Visualisasi Ajaran Kepemimpinan dalam Astra Brata

Ajaran Astra Brata ini menawarkan pedoman bagi para pemimpin untuk meneladani delapan sifat dewa, yang masing-masing melambangkan karakter utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sistem kepemimpinan Jawa. Astra Brata berfungsi sebagai panduan etika dan moralitas yang mendasari tindakan dan keputusan pemimpin, serta menciptakan keseimbangan antara tanggung jawab duniawi dan kewajiban spiritual. Berikut ini adalah visualisasi dari karakter-karakter utama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kosmologi kepemimpinan Jawa, sesuai dengan ajaran Astra Brata dalam beberapa naskah serat Jawa.

Tabel 1. Nilai-Nilai Ajaran Kepemimpinan dalam Astra Brata

Serat Rama	Serat Sruti Jarwa	Serat Pethikan Pustakaraja Purwa	Kakawin Ramayana	Serat Ajipamasa	Serat Nitistruti
Surya (dewa matahari) adalah simbolisasi keadilan, pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan musyawarah, serta menghindari tindakan konfrontasi yang bersifat kekerasan.	Surya Brata simbolisasi pemimpin yang mampu menciptakan kerukunan dan keseimbangan dalam masyarakat, menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai harmoni.	Watak Surya (matahari) melambangkan pemimpin yang bertindak perlahan-lahan dan penuh kehati-hatian dalam mempengaruhi orang-orang di sekitarnya.	Dewa Matahari (Rawi) yang secara perlahan menyerap air menunjukkan bahwa seorang raja harus memiliki kesabaran dan keberanian dalam melindungi rakyatnya dari segala ancaman.	Surya (Matahari) Pemimpin yang sabar, memberi pencerahan, dan tidak mudah putus asa.	Surya (matahari) melambangkan pemimpin yang membimbing pengikutnya dengan kesabaran, tanpa melakukan konfrontasi secara keras.
Bayu (dewa angin) melambangkan kepemimpinan yang cermat dan	Bayu Brata simbolisasi pemimpin ideal harus mawas diri dan penuh	Watak Samirana (angin) menyimbolkan seorang pemimpin yang	Haninbrata (Dewa Angin) melambangkan kemampuan raja untuk mengawasi	Maruta (Angin) Pemimpin yang waspada,	Bayu (angin) disimbolisasikan sebagai pemimpin yang kaya ilmu

selalu memperhatikan kesejahteraan pengikutnya.	kebijaksanaan, serta peka terhadap aspirasi dan harapan rakyatnya, memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	mampu meneliti dan memeriksa perilaku para pengikutnya secara cermat dan bijaksana.	setiap gerak-gerik rakyatnya dengan ketenangan.	merakyat, dan selalu bermanfaat bagi orang lain.	pengetahuan, teliti dalam pengamatan, dan senantiasa mengawasi para pengikutnya dengan seksama.
Candra (dewa bulan) merupakan simbolisasi pemimpin yang pemaaf, selalu ceria, dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi para pengikutnya.	Candra Brata simbolisasi yang mampu menginspirasi dan memberdayakan rakyatnya, serta menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat dapat berkembang dan merasa bahagia.	Watak Rembulan (Bulan) merupakan simbolisasi pemimpin yang periang dan menyenangkan bagi para pengikutnya.	Sasibrata (Dewa bulan) Seorang merepresentasikan pemimpin harus mampu membawa kegembiraan dan ketenangan kepada rakyatnya melalui kebijakan yang menenangkan dan bijaksana.	Candra (Bulan) Pemimpin yang lembut, berbelas kasih, dan menciptakan kedamaian.	Candra (Bulan) mencerminkan kualitas pemimpin yang membawa kesejukan dan kenyamanan bagi bawahannya, menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebahagiaan.
Brama (dewa api) melambangkan seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan memotivasi para pengikutnya untuk bertindak.	Brama Brata melambangkan ketegasan pemimpin dalam situasi kritis, terutama dalam menghadapi konflik atau peperangan, seperti harimau yang buas saat diperlukan.	Watak Agni (api) melambangkan simbolisasi pemimpin yang tegas dan adil dalam menegakkan hukum serta memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah.	Agnibrata (Dewa Api) melambangkan keberanian seorang raja dalam menghadapi musuh.	Dahana (Api) Pemimpin yang berwibawa, adil, bersemangat, dan tidak tamak.	Brama (Api) melambangkan seorang pemimpin yang penuh semangat dan keberanian dalam menghadapi tantangan.
Kuwera (dewa bumi) adalah simbolisasi pemimpin yang adil, dapat dipercaya, dan tidak membedakan pengikutnya.	Cakra Brata simbolisasi pemimpin yang konsisten dan berkelanjutan dalam usahanya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tanpa mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.	Watak bumi melambangkan sifat pemimpin yang murah hati. Sebagaimana bumi menyediakan segala sesuatu tanpa pilih kasih.	Bayubrata Simbol dari sikap kesederhanaan seorang pemimpin. Seorang raja dilarang untuk hidup dalam kemewahan yang berlebihan dan harus menunjukkan sikap yang sederhana, menghindari keserakahan dan kesenangan yang berlebihan.	Pratala (Tanah) Pemimpin yang murah hati, menolong, dan ikhlas, serta tidak mendendam.	Kuwera (bumi) Sebagai simbolisasi pemimpin, Kuwera mencerminkan kemampuan seorang pemimpin untuk menularkan semangat serta motivasi kepada para pengikutnya, memberikan inspirasi dalam mencapai tujuan bersama.
Endra (dewa hujan) merupakan simbolisasi seorang pemimpin yang memberikan manfaat, keberkahan, atau nilai tambah kepada seluruh	Indra Brata simbolisasi pemimpin yang adil dan memberi kebaikan kepada semua makhluk hidup tanpa membedakan status atau kedudukan.	Watak Tirta (air) Sebagai simbolisasi seorang pemimpin, sifat tirta (air) melambangkan sikap pemaaf dan kemampuan untuk memulihkan	Indrabrata (Dewa Indra) yang memberikan hujan kepada seluruh kerajaan merepresentasikan raja yang murah hati dan dermawan kepada rakyatnya.	Tirta (Air) Pemimpin yang pemaaf dan mampu menciptakan kedamaian serta ketentraman.	Endra (hujan) melambangkan seorang pemimpin yang memiliki kewajiban untuk menjaga kesopanan dan santun dalam bersikap terhadap para pengikutnya.

pengikutnya tanpa diskriminasi.	keadaan.				
	Baruna Brata simbolisasi pemimpin yang memiliki integritas, jujur dalam tindakan, dan konsisten dalam prinsip- prinsip yang dipegang.	Watak Mendung (Awan/Langit) Simbolisasi pemimpin yang adil, tidak pilih kasih dalam memperlakukan pengikut atau rakyatnya.	Barunabrata (Dewa Baruna) yang selalu membawa senjata mematikan, merepresentasikan kesiagaan raja dalam menghadapi ancaman dari unsur-unsur jahat di dalam dan di luar kerajaannya.	Mendhung (Awan) Pemimpin yang adil, berwibawa, dan selalu menolong rakyatnya.	Baruna (laut) adalah simbolisasi seorang pemimpin yang berani menghadapi berbagai masalah dan tantangan, serta mampu menghimpun pengetahuan dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitasnya.
Yama (dewa kematian) adalah simbol dari ketegasan, keberanian, dan keadilan dalam menghukum kesalahan serta membersihkan situasi yang tidak baik.		Watak Lintang (Bintang) Simbolisasi dari seorang pemimpin yang kuat dalam memegang prinsip dan tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan eksternal.	Yamabrata (dewa kematian) melambangkan keinginan raja untuk menghukum segala bentuk kejahatan dalam kerajaannya dengan adil.	Sudama (Bintang) Pemimpin yang teguh pendirian, sopan santun, dan menjadi teladan.	Yama (kematian) merupakan simbolisasi pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan. Ia digambarkan sebagai sosok yang tanpa ragu memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan.

Ajaran Astra Brata dalam berbagai naskah Jawa kuno menawarkan variasi interpretasi mengenai karakteristik kepemimpinan yang ideal. Meskipun prinsip dasar ajaran ini tetap berfokus pada delapan sifat dewa, penerapannya berbeda-beda dalam setiap naskah, sesuai dengan konteks sosial dan budaya pada masa penulisannya. Variasi ini menunjukkan bahwa Astra Brata merupakan ajaran yang fleksibel, mampu menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan tantangan kepemimpinan. Sebagai contoh, Surya Brata dalam Serat Rama digambarkan sebagai simbol kepemimpinan yang menekankan keadilan dan musyawarah, dengan fokus pada menghindari konfrontasi kekerasan.

Di sisi lain, dalam Serat Sruti Jarwa, Surya Brata mengacu pada kemampuan pemimpin untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat, di mana perbedaan dianggap sebagai kekuatan untuk mencapai keseimbangan. Sementara dalam Kakawin Ramayana, Surya lebih dipahami sebagai simbol kepemimpinan yang mengedepankan kehati-hatian dan kesabaran dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Bayu Brata yang melambangkan kewaspadaan dan kebijaksanaan, juga memiliki interpretasi yang bervariasi. Dalam Serat Rama, Bayu digambarkan sebagai pemimpin yang cermat dalam memperhatikan kesejahteraan pengikutnya, sementara dalam Serat Sruti

Jarwa, Bayu ditekankan sebagai pemimpin yang mawas diri dan peka terhadap aspirasi masyarakat. Kakawin Ramayana menekankan peran Bayu dalam mengawasi perilaku pengikut dengan teliti.

Berdasarkan temuan tersebut, ajaran Astra Brata tidak hanya menekankan pada dimensi fisik dalam kepemimpinan, tetapi juga mencakup dimensi etis, spiritual, dan sosial (Moedjanto, 1987, pp. 101–103). Hal ini sejalan dengan pandangan Fachry Ali yang menyatakan bahwa dalam kosmologi kepemimpinan Jawa, seorang pemimpin ideal harus mengintegrasikan tiga aspek fundamental, yakni kepemimpinan negara, kepemimpinan agama, dan kemampuan sebagai panglima perang. Integrasi ketiga aspek ini menghasilkan sosok pemimpin yang tidak hanya berlandaskan ketaatan beragama, tetapi juga memiliki keberanian dalam menegakkan keadilan serta kebijaksanaan dalam mengelola masyarakat (Ali, 1986, pp. 3–4).

Relevansi Ajaran Astra Brata dalam Mengatasi Krisis Kepemimpinan di Indonesia

Dalam konteks Indonesia saat ini, di mana krisis kepemimpinan Tengah terjadi dengan ditandai oleh ketidakpercayaan publik, korupsi, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ajaran Astra Brata memberikan relevansi penting dalam menciptakan pemimpin yang mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. *Pertama*, Surya Brata, sebagai salah satu ajaran dari Astra Brata, menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, dan harmoni dalam kepemimpinan. Prinsip ini mengajarkan bahwa pemimpin yang ideal harus mampu menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang terpecah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 218 kasus konflik sosial sepanjang tahun 2023 (Kementrian Dalam Negeri, 2023).

Kasus terbaru terjadi di Kota Solo, di mana bentrokan antara kelompok warga terjadi di Jalan Bromo, Kelurahan Kadipiro, yang melibatkan puluhan pemuda berusia 19-26 tahun. Konflik semacam ini menunjukkan betapa rapuhnya hubungan sosial di kalangan masyarakat dan pentingnya peran pemimpin dalam meredam potensi kekerasan (Trisetiawan Putra, 2023). Dalam menghadapi konflik sosial semacam ini, Surya Brata menawarkan pendekatan yang menekankan pada musyawarah dan dialog terbuka sebagai upaya untuk meredakan ketegangan. Pemimpin yang menerapkan prinsip Surya Brata akan memfasilitasi pertemuan antara kelompok yang bertikai, menciptakan ruang untuk dialog yang damai dan rekonsiliasi.

Kedua, Bayu Brata menekankan pentingnya kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam memahami kebutuhan rakyat. Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan yang ditandai oleh ketidakmampuan pemimpin untuk

mendengar dan merespons aspirasi masyarakat, seperti yang terlihat dalam protes terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, misalnya dalam pengesahan Omnibus Law (Helmi, 2023). Prinsip Bayu Brata mengajarkan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan melalui pendekatan partisipatif, yang dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.

Ketiga, Candra Brata menekankan pada pentingnya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Ketegangan politik dan sosial di Indonesia sering kali disebabkan oleh kebijakan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan emosional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam krisis pandemi Covid-19, kebijakan yang tidak jelas dan kurangnya perlindungan sosial menyebabkan keresahan sosial (detikcom, 2021). Candra Brata mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang lembut, peka terhadap kondisi masyarakat, dan mampu memberikan solusi yang membawa kedamaian dan keamanan bagi semua pihak.

Keempat, Brama Brata mengajarkan ketegasan dan keberanian dalam menegakkan hukum dan keadilan, terutama dalam situasi kritis. Krisis korupsi yang melanda Indonesia mencerminkan kelemahan dalam menegakkan hukum secara tegas. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, seperti dalam kasus Jiwasraya, menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah dan selektif (Puspadini, 2024). Ajaran Brama Brata menuntut pemimpin untuk memiliki keberanian dalam menindak tegas pelanggaran hukum dan menjamin bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kelima, Kuwera Brata merupakan salah satu prinsip kepemimpinan dalam ajaran Astra Brata yang melambangkan kemurahan hati, kesederhanaan, dan integritas. Di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi di Indonesia, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elit, ajaran ini menekankan pentingnya kedermawanan dan keadilan sosial dalam kepemimpinan. Pemimpin yang meneladani Kuwera Brata diharapkan menjalani kehidupan yang sederhana, menghindari perilaku hedonistik, dan lebih berfokus pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi kritik terhadap gaya hidup mewah para pejabat, yang kerap dinilai tidak sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat miskin.

Salah satu kasus terbaru adalah penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yang kemudian menimbulkan kontroversi publik, menggambarkan pentingnya ajaran Kuwera Brata dalam konteks modern (Okezone, 2024). Penggunaan fasilitas mewah oleh figur publik ini memunculkan pertanyaan terkait potensi gratifikasi, hingga Ketua Umum PSI tersebut mendatangi Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi (Andryanto, 2024). Meskipun kasus ini masih dalam proses penelaahan oleh KPK, peristiwa ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin yang sederhana dan realitas yang menunjukkan gaya hidup mewah.

Keenam, ajaran Endra Brata dalam Astra Brata menekankan bahwa seorang pemimpin harus memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang adil dan inklusif, di mana setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial, agama, atau etnis. Di Indonesia, permasalahan diskriminasi terhadap kelompok minoritas masih menjadi isu serius, seperti yang tercatat dalam laporan Human Rights Watch (HRW) terbaru. Dalam laporan tersebut, HRW menyatakan bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, diskriminasi dan penangkapan terhadap orang asli Papua "sangat menonjol" dan jumlahnya meningkat dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya (*Laporan Human Rights Watch*, 2024).

Andreas Harsono, peneliti HRW, menyoroti bahwa tindakan diskriminatif ini terlihat jelas dalam penahanan setidaknya 400 orang yang terkait dengan demonstrasi yang berujung pada kerusakan di Jayapura, Papua, pada Agustus 2019 (BBC, 2019). Demonstrasi ini merupakan respons terhadap penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Rachmawati, 2019). Selain itu, berdasarkan penelitian Windar, di Indonesia kekerasan dan diskriminasi masih sering terjadi, yang berpotensi memperburuk konflik sosial dalam konteks krisis multidimensi yang sedang berlangsung. Konteks ini memperlihatkan urgensi untuk menerapkan ajaran Endra Brata dalam praktik kepemimpinan di Indonesia. Prinsip ini mendorong pemimpin untuk bersikap adil dan menghindari tindakan diskriminatif yang didasarkan pada etnisitas, agama, atau latar belakang sosial.

Ketujuh, Baruna Brata menekankan pentingnya integritas dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diyakini oleh seorang pemimpin. Dalam konteks krisis kepercayaan publik di Indonesia, ajaran ini menjadi sangat relevan, terutama mengingat berbagai skandal yang menunjukkan lemahnya integritas pemimpin, seperti yang terungkap dalam skandal bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19. Salah satu kasus signifikan adalah penyimpangan dalam distribusi paket sembako oleh Kementerian Sosial pada tahun 2020, dengan nilai total sekitar Rp 5,9 triliun yang melibatkan 272 kontrak dalam dua periode (Sahara, 2021). Skandal ini mencerminkan kegagalan pemimpin dalam memegang teguh prinsip-prinsip moral dan hukum. Ajaran ini menuntut

pemimpin untuk konsisten dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum, menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kedelapan, Ajaran Yama Brata menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan adil sebagai pilar utama dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif dan etis. Dalam konteks Indonesia, krisis penegakan hukum menjadi salah satu tantangan serius, khususnya dalam menangani kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Kerap kali, pemimpin dianggap tidak memiliki ketegasan yang memadai dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum, sehingga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi-institusi penegakan hukum (Vidyapramatya, 2020, p. 141).

Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia memperkuat adanya masalah mendasar dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak tahun 2016, Ombudsman telah menerima setidaknya 10.000 laporan masyarakat, di mana sekitar 6.000 laporan di antaranya terkait langsung dengan masalah penegakan hukum. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4.000 laporan melibatkan kasus maladministrasi yang dilakukan oleh kepolisian, yang semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten (Ombudsman RI, 2019).

Dalam kerangka ajaran Yama Brata, pentingnya penegakan hukum yang adil tidak hanya untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga hukum. Pemimpin yang ideal menurut ajaran ini adalah mereka yang berani mengambil langkah tegas dan adil dalam menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hukum, sehingga mampu menciptakan rasa keadilan yang merata dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil tidak hanya berdampak pada individu yang melanggar hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi moral dan kredibilitas institusi pemerintahan di mata rakyat.

Secara keseluruhan, ajaran Astra Brata menawarkan kerangka etis dan moral yang relevan untuk mengatasi berbagai persoalan kepemimpinan di Indonesia. Krisis kepercayaan publik, ketidakadilan, korupsi, dan diskriminasi dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Astra Brata, yaitu keadilan, kebijaksanaan, keberanian, kedermawanan, dan integritas. Pemimpin yang meneladani ajaran ini akan mampu menciptakan kepemimpinan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, yang sangat diperlukan dalam mengatasi tantangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia saat ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ajaran Hastrabrata atau Astra Brata dalam naskah-naskah Jawa kuno memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kepemimpinan modern di Indonesia. Ajaran ini, yang terdiri dari delapan prinsip utama yang diambil dari sifat-sifat dewa, menawarkan kerangka nilai yang mencakup dimensi etis, spiritual, dan sosial dalam membentuk karakter seorang pemimpin ideal. Penelitian mendapati bahwa fleksibilitas ajaran Hastrabrata memungkinkan adaptasinya dengan kebutuhan dan tantangan sosial-politik yang berbeda di setiap zaman.

Dalam menghadapi krisis kepemimpinan yang melanda Indonesia saat ini, ajaran Hastrabrata dapat berfungsi sebagai model kepemimpinan transformatif. Prinsip seperti Surya Brata misalnya menekankan keadilan dan musyawarah untuk meredam konflik sosial, sedangkan Bayu Brata mendorong kewaspadaan dan kebijaksanaan dalam memahami aspirasi masyarakat. Candra Brata dan Brama Brata menekankan kedamaian, kesejahteraan, serta ketegasan dalam penegakan hukum, yang relevan dalam memberantas korupsi.

Kuwera Brata mengajarkan kesederhanaan dan keadilan sosial, sementara Endra Brata, Baruna Brata, dan Yama Brata menggarisbawahi integritas, inklusivitas, dan keadilan sebagai pilar utama kepemimpinan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik kepemimpinan, ajaran Hastrabrata memberikan solusi yang komprehensif untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar dalam kepemimpinan Indonesia. Model kepemimpinan berdasarkan Hastrabrata ini tidak hanya mampu menyelesaikan krisis saat ini, tetapi juga berpotensi membangun tatanan kepemimpinan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, N. F., & Laskar, F. I. (2020). Managing Diversity in History Learning Based on the Perspective of Kakawin Ramayana. *Paramita: Historical Studies Journal*, 30(2), 192–207. <https://doi.org/10.15294/paramita.v30i2.23690>
- Ali, F. (1986). *Refleksi Paham "Kekuasaan Jawa" dalam Indonesia Modern*. Gramedia.
- Anandya, D., Ramdhana, K., Anisah, A., Harmein, A. L., Qulbi, A. U. N., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.
- Andoko, B. W., Haryono, S., H, S., & ari Wahyuningsih, E. P. P. (2022). The Study of Literature Review: Local Leadership in the Java Culture

- Perspective “Asta Brata” in Organizations. *Webology*, Volume 19(No. 1), 2731–2747. <https://doi.org/10.14704/WEB/V19I1/WEB19182>
- Andryanto, S. D. (2024, September 18). *Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1917820/viral-klarifikasi-kaesang-ke-kpk-soal-gratifikasi-jet-pribadi-numpang-ke-teman-bahasa-bekennya-nebeng>
- Anggoro, W. J. (2021). Studi Eksplorasi Konstrak Kepemimpinan Model Jawa: Asta Brata. *Jurnal Psikologi*, 38, 228–239. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7655>
- BBC. (2019). Jayapura rusuh, diwarnai aksi pembakaran dan penjarahan: “Ada yang mau mengacaukan Papua” kata Wiranto. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49506881>
- Behrend, T. E. (1990). *Katalog induk naskah-naskah nusantara*. Yayasan Obor Indonesia.
- Brigg, M., Wilson, L., de Jalong, F., & Sugiono, M. (2016). Diversity, democratisation and Indonesian leadership. *Australian Journal of International Affairs*, 70(4), 407–421. <https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1153599>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- detikcom, T. (2021). *Mahfud Ungkap 2 Keresahan Masyarakat Saat Pandemi COVID Tak Menentu*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5655073/mahfud-ungkap-2-keresahan-masyarakat-saat-pandemi-covid-tak-menentu>
- Helmi, I. (2023). *Demo Buruh Desak Omnibus Law UU Cipta Kerja Dicabut, Orator: UU Ini Perbudakan Modern!* <https://www.kompas.tv/regional/448385/demo-buruh-desak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dicabut-orator-uu-ini-perbudakan-modern?page=all>
- Kamil, I. (2024). *Survei CSIS: KPK Jadi Lembaga Penegak Hukum Terbawah yang Dipercaya Publik*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/28/06014031/survei-csis-kpk-jadi-lembaga-penegak-hukum-terbawah-yang-dipercaya-publik>
- Karanggayam, P. (1994). *Serat Nitistruti*. Dahaga Prize.
- Kementrian Dalam Negeri. (2023). *E-Database: Angka Kejadian Konflik Sosial 2023*. <https://e-database.kemendagri.go.id/kemendagri/dataset/1162/tabel-data>
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE.

- Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua "lebih banyak dan sangat kelihatan" di rezim Jokowi.* (2024, September 19). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/czj97xgl470o>
- Marsiwi, B. (2020). *Serat Sruti Jarwa (SRUTJAR)* karya K.P.A Santakusuma. Perpustakaan Press.
- Marsiwi, B., Susanto, S., & Supana, S. (2021). The Discourse of the Javanese King's Power in the Old Javanese Manuscript Serat Sruti Jarwa by K.P.A Santakusuma. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(6), Article 6. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i6.2655>
- Media, K. C. (2024, May 19). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkatkan Signifikan.* KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan>
- Moedjanto, G. (1987). *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram.* Kanisius.
- Okezone. (2024, September 24). *Kaesang Pakai Jaket Putra Mulyono saat KPK Saling Pingpong Kasus Jet Pribadi: Okezone Nasional.* <https://nasional.okezone.com/>.
<https://nasional.okezone.com/read/2024/09/24/337/3067177/kaesang-pakai-jaket-putra-mulyono-saat-kpk-saling-pingpong-kasus-jet-pribadi>
- Ombudsman RI, O. (2019). *Ombudsman: Penegakan hukum di RI buruk.* <https://ombudsman.go.id:443/news/r/ombudsman-penegakan-hukum-di-ri-buruk>
- Pigeaud, H. J. de G. T. G. T. (1986). *Kerajaan-Kerajaan Islam Di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram.* Pustaka Grafiti.
- Puspadini, M. (2024). *Kronologi Kasus Mega Korupsi Jiwasraya Hingga Kena Sanksi PKU.* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240917124907-17-572355/kronologi-kasus-mega-korupsi-jiwasraya-hingga-kena-sanksi-pku>
- Putri, Z. (2024). *Survei CSIS: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Nomor 2 dari Bawah.* detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7111465/survei-csis-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik-kpk-nomor-2-dari-bawah>
- Rachmawati. (2019). *Kaleidoskop 2019: Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Halaman all—Kompas.com.* https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06360081/kaleidoskop-2019--pengepungan-asrama-mahasiswa-papua-di-surabaya?page=all#google_vignette

- Rhohana, S. (2022). Nilai-Nilai Asthabrata Sebagai Local Wisdom Untuk Penguatan Sikap Kepemimpinan Dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series*, 5, 263. <https://doi.org/10.20961/shes.v5i1.57807>
- Riyadi, M. I., & Muzakki, M. H. (2020). Menggagas Islam Inklusif Budaya Jawa Dalam Serat Nitistruti Zaman Kasultanan Pajang (Abad 16 M). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.31291/jlka.v18i1.590>
- Sadewa, T. (2023). Anoman Angrërëpi Munggend Nagasëkar: Dari Rubrikasi Hingga Hubungan Intertekstual Sërat Rama Jayakusuman dengan Sërat Rama Yasadipuran. *Arnawa*, 1, 76–91. <https://doi.org/10.22146/arnawa.v1i2.11247>
- Sahara, W. (2021). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara Halaman all—Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>
- Selvarajah, C., Meyer, D., Roostika, R., & Sukunesan, S. (2017). Exploring managerial leadership in Javanese (Indonesia) organisations: Engaging Asta Brata, the eight principles of Javanese statesmanship. *Asia Pacific Business Review*, 23(3), 373–395. <https://doi.org/10.1080/13602381.2016.1213494>
- Suyono, J. (2023). Empirical study of Javanese leadership style in Surakarta, Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.29210/020232262>
- Trisetiawan Putra, A. (2023). 46 Orang Ditangkap Saat Tawuran di Kadipiro Solo. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7090186/46-orang-ditangkap-saat-tawuran-di-kadipiro-solo>
- Utama, H. F. (2023). Analisis Fungsional Terhadap Kebijakan Pemerintahan Mpu Sindok pada Abad ke-10 M. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.52829/pw.408>
- Vidyapramatya, N. N. (2020). HILANGNYA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM MENURUT TEORI DISKRIMINASI. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49763>